

**GERAKAN PENUMPASAN TERHADAP PKI DI
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, SUMATERA BARAT**

1965-1966

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Panitia Ujian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sejarah*



Oleh:

EDMOND DANTES

06 181 036

JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 30 September 1965 sampai pertengahan tahun 1966 terjadi pertumpahan darah di Indonesia yang diaktori oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), militer dan kelompok-kelompok Islam.¹ Ujung dari peristiwa tersebut adalah munculnya aksi penghancuran terhadap PKI sampai ke akar-akarnya. Orang-orang PKI yang aktif maupun tidak aktif dibunuh, dianiaya, dan ditahan tanpa proses persidangan. Mereka dianggap sebagai penghianat negara dan pancasila.²

Soeharto dengan dukungan rakyat yang anti PKI mengambil tindakan membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pembersihan dilakukan dengan menangkap, menahan, dan membunuh siapa saja yang dianggap PKI dan simpatisan PKI.³ Penumpasan juga dilakukan di Sawahlunto/Sijunjung, semua yang berbau PKI diberantas. Penumpasan yang dilakukan oleh militer, bermula dengan pengejaran, penangkapan dan tindak kekerasan terhadap tokoh-tokoh PKI ataupun terhadap orang yang hanya ikut-ikutan. Daerah ini merupakan salah satu dari basis PKI di Sumatera Barat, selain Pariaman.

Pengalaman masa lalu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung memperlihatkan adanya kegiatan radikal yang terkait dengan pemberontakan PKI melawan

¹ Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2000), hlm. 38-39.

² I. G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Jakarta : PT LP3ES Indonesia, 2000), hlm. 10.

³ Untuk lebih jelas lihat J. Pohan , *Siapa Kudeta?* (Tanpa kota : Indonesia Baru, 1998), hlm. 4.

Belanda pada tahun 1926/1927, sehingga paham komunis masih mempengaruhi pola pikir masyarakat yang diwarisi turun-temurun.⁴ Selain itu disaat penumpasan PRRI di Sumatera Barat oleh aparat militer dari Teritorium Diponegoro, digunakan sebagai kesempatan untuk menyebarkan pengaruh komunis di Sawahlunto/Sijunjung.⁵

Selama Rezim Suharto sangat tabu membicarakan tema tentang PKI. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan Indonesia memasuki era reformasi yang membolehkan adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan berkarya, sehingga membuka peluang untuk mengkaji hal-hal yang dianggap tabu selama ini, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas dan penumpasan PKI yang telah disebarkan oleh TNI pada masyarakat umum. Fenomena ini menjadi salah satu alasan menariknya kajian ini dilakukan.

Keberadaan PKI oleh rezim Orde Baru diberi label sebagai sesuatu yang bersifat *atheis* (tidak bertuhan), jahat, biadab dan tidak bermoral. Penulisan dalam bentuk apapun selalu dibatasi oleh rezim Orde Baru. Keadaannya berbeda dengan saat sekarang, yang tidak lagi melarang penelitian tentang pemberontakan PKI, aksi penumpasan, sejauhmana dan siapa yang melakukan tindak kekerasan terhadap PKI.⁶

Banyak karya atau tulisan yang dibuat pada masa Orde Baru mengenai PKI, terdapat aroma pendiskriminasian yang menyolok. Pemerintah sebagai

⁴ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 314.

⁵ Rika Wahyuni, "Zainar : Biografi Seorang Aktifis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 1958-2008", *Skripsi* (Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2010), hlm. 31.

⁶ Jhon Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta : Hasta Mitra, 2008), hlm. 1-4.

pengendali negara, mencoba untuk mempengaruhi masyarakat dengan melahirkan karya yang menyatakan bahwa PKI adalah suatu yang harus dimusnahkan, suatu yang harus dibenci. Tulisan yang berimbang tentang PKI di Sumatera Barat ditulis oleh Audrey Kahin dalam tulisannya yang berjudul *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*.⁷ Kahin menulis bahwa PKI adalah salah satu organisasi politik yang tumbuh dalam perdebatan hangat antar berbagai golongan di Sumatera Barat, namun mampu memberikan gerakan yang signifikan bagi kemajuan gerakan nasionalisme di Sumatera Barat. Hal ini terlihat melalui peristiwa Pemberontakan Silungkang yang dimotori PKI dalam melawan Pemerintah Kolonial Belanda.

Tulisan lain adalah yang ditulis oleh Saafrudin Bahar dalam disertasinya yang berjudul “Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)”. Saafrudin Bahar membahas bahwa penumpasan PKI di Sumatera Barat lebih didorong oleh gerakan massa yang tidak lagi menginginkan PKI tumbuh di Sumatera Barat.⁸ Analisis ini banyak digunakan dalam banyak penulisan atas penumpasan PKI di Indonesia pada masa tersebut, yang membedakannya hanya daerah penelitian saja.

Selain itu Mestika Zed, Eddy Utama dan Hasril Chaniago melihat ada indikasi pembalasan dendam oleh orang-orang yang selamat pada peristiwa PRRI dalam pemberantasan PKI di Sumatera Barat, alasannya adalah di saat PRRI

⁷ Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 314.

⁸ Saafrudin Bahar, “Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)”, *Disertasi* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 410-510.

terjadi, yang menentang pada umumnya adalah orang-orang yang beraliran komunis.⁹ Saat situasi berbalik, orang-orang PRRI menggunakan kesempatan tersebut. Asvi Warman Adam menerangkan bahwa kalau ada pemuda atau rakyat lain yang melakukan pembunuhan dalam rangka pembasmian PKI itu adalah setelah kedatangan militer dari pusat ke daerah.¹⁰

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru banyak lahir tulisan yang lebih bersifat PKI sentris, karena sumber-sumber yang umum mereka pakai adalah dari korban-korban “penindasan”. Tulisan itu lahir dari korban itu sendiri, seperti yang terungkap dalam memoar-memoar dari para korban penindasan Orde Baru. Hersri Setyawan dalam *Memoar Pulau Buru* memberikan gambaran tidak manusiawinya perlakuan pemerintah terhadap orang-orang yang dituduh PKI, mereka disiksa dan tenaga mereka dikuras.¹¹ Tulisan tersebut juga membahas bahwa mereka yang menjadi tahanan tidak mendapatkan tempat atau makanan yang layak sebagai seorang manusia, saat mereka melakukan kesalahan maka mereka akan disiksa tanpa ampun, di saat sakit pun mereka tidak diberi obat, melainkan disiksa, sepertinya itulah obat bagi seorang tahanan politik. Suatu tindakan yang nyata-nyata melanggar hak asasi manusia.¹²

Tulisan lain adalah yang ditulis oleh Hasan Raid yang berjudul *Pergulatan Muslim Komunis : Otobiografi Hasan Raid*, memaparkan panjang lebar mengenai

⁹ Mestika Zed (dkk), *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Sumatera Barat : Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat, 1992), hlm. 310-412.

¹⁰ Asvi Warman Adam, “1965: Tahun yang Tak Pernah Berakhir” dalam Dewi Fortuna Anwar (ed), *Konflik Kekerasan Internal; Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS dan KITLV-Jakarta, 2005), hlm. 34.

¹¹ Hersri Setyawan, *Memoar Pulau Buru* (Magelang : Indonesiatara, 2004), hlm. 20-201.

¹² *Ibid.*,

PKI pada masa pemberontakan 1926-1927, menjelaskan bagaimana terjadinya pemberontakan, dan menggambarkan bagaimana jatuh banggunya PKI menjelang terjadinya peristiwa 1965, dan perlakuan yang dialami setelah peristiwa tersebut.¹³ Terlihat bahwa karya tulis ini merupakan reaksi dari tulisan-tulisan yang dibuat masa Orde Baru. Sangat menarik mengkaji hal yang selama Rezim Suharto disembunyikan, seiring dengan kebebasan yang didapat, tentunya akan melahirkan fenomena baru yang selama ini belum terpahami oleh masyarakat luas.

Hermawan Sulistyio dalam bukunya yang berjudul *Palu Arit di Ladang Tebu*. Ia telah menguraikan panjang lebar mengenai tindak kekerasan terhadap PKI yang terjadi di Jawa Timur. Pemuda Ansor menjadi titik sentral dalam pembunuhan yang terjadi di Jawa Timur. Motif penguasaan atas industri gula menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas konflik politik yang terjadi dan hal ini memberikan peluang pada terjadinya tindak pembunuhan ketika pemerintah memberi ruang pada adanya akses bagi terjadinya tindak kekerasan.¹⁴

I. G. Krisnadi dalam bukunya *Tahanan Politik Pulau Buru 1966-1979*, yang menjelaskan situasi sebelum penumpasan PKI terjadi sampai pada suasana yang dialami oleh para anggota PKI pada masa-masa rehabilitasi yang sarat dengan pelanggaran hak azazi manusia. Orang-orang yang dituduh PKI dibagi menjadi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan A, B, dan C, dan hukuman yang mereka alami pun disesuaikan dengan golongan yang diberikan terhadap mereka. Menurut Krisnadi biasanya yang paling berat dihukum adalah orang-

¹³ Hasan Raid, *Pergulatan Muslim Komunis : Otobiografi Hasan Raid* (Yogyakarta : LKPSM-Syarikat, 2001), hlm. 1-525.

¹⁴ Hermawan Sulistyio, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta : KPG, 2000), hlm. 12-143.

orang yang digolongkan menjadi golongan A, dalam hal ini mereka biasanya dibunuh di tempat atau dieksekusi di dalam penjara tanpa mendapatkan pengadilan atas tuduhan yang diberikan. Suatu tindak ketidakadilan yang didapatkan oleh orang-orang yang dituduh sebagai PKI yang disahkan oleh pemerintah saat itu.¹⁵

Baskara T. Wardana dkk, dalam bukunya *Menguak Misteri Kekuasaan Suharto*, menjelaskan kekejaman rezim Orde Baru dalam melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa 1 Oktober 1965. Pemerintah memberikan hukuman mati, bahkan ikut dalam aksi pembunuhan massal, pelecehan, kekerasan baik fisik maupun mental yang dialami oleh orang-orang PKI selama tahanan. Setelah mereka dibebaskan pun, pelanggaran HAM belum berhenti dilakukan oleh pemerintah dengan mendiskriminasi dan menstigmatisasikan mereka, dengan memberika tanda “ET” terhadap bekas tahanan politik Orde Baru itu, yang bertujuan untuk mempersulit hidup dan mempersempit ruang gerak dari orang-orang PKI.¹⁶

Tulisan lain mengenai penangkapan dan pemberantasan PKI yang terkait dengan daerah Sumatera Barat adalah tulisan Rika Wahyuni yang berjudul “Zainar : Biografi Seorang Aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 1958-2008. Tulisan ini memberikan gambaran tentang kegiatan Gerwani sebagai salah satu ormas PKI,

¹⁵ I. G Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Jakarta : PT. LP3ES Indonesia, 2000.), hlm. 5.

¹⁶ Baskara T. Wardana (dkk), *Menguak Misteri Kekuasaan Suharto* (Yogyakarta : Galang Press, 2007), hlm. 5-100.

menjelaskan bagaimana proses penumpasan terhadap PKI, dan tindakan apa saja yang dialami mereka selama masa penahanan.¹⁷

Semua karya tulis tentang penumpasan PKI yang lahir sebagian besar berbicara dalam skop nasional, dan sedikit yang membahas pada tingkat lokalitas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melihat sejauh mana kekerasan terhadap PKI terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks itulah penulisan ini mencoba untuk membicarakan proses penumpasan terhadap PKI pada tingkat lokalitas. Tulisan ini diberi judul “ **Gerakan Penumpasan Terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung, Sumatera Barat 1965-1966**”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Batasan spasial yang diambil adalah wilayah Sawahlunto/Sijunjung, yang merupakan salah satu basis PKI di Sumatera Barat selain Pariaman. Batasan waktu yang diambil adalah dari tahun 1965-1966, hal ini dilakukan karena penulis merasa bahwa pada tahun 1965-1966 adalah masa-masa dilakukannya penumpasan PKI di Sawahlunto/Sijunjung.

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penulisan ini maka dikemukakan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimanakah situasi politik di Sumatera Barat umumnya dan di Sawahlunto/Sijunjung khususnya sebelum peristiwa 30 September 1965 dan gerakan apa sajakah yang dilakukan oleh anggota PKI di Sawahlunto/Sijunjung?

¹⁷ Rika Wahyuni, *op.cit.*, hlm. 50-77.

2. Tindakan apa saja yang dilakukan terhadap orang-orang PKI di Sawahlunto/Sijunjung setelah gagalnya Gerakan 30 September 1965?
3. Dari kalangan manakah pelaku penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat situasi politik di Sumatera Barat dan di Sawahlunto/Sijunjung pada kurun waktu 1950 sampai 1960-an. Dalam konteks itu pulalah dipelajari gerakan yang dilakukan oleh PKI di Sawahlunto/Sijunjung guna meluaskan pengaruhnya.
2. Melihat proses penumpasan dan tindakan apa saja yang dialami oleh orang-orang PKI pada saat penumpasan pasca gagalnya kudeta 1965.
3. Untuk mengetahui latar belakang sosial dari pelaku-pelaku yang melakukan penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung.

D. Kerangka Analisis

Penumpasan adalah sebuah tindakan pemusnahan secara fisik maupun pikiran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Biasanya penumpasan ini dilakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang keras atau dengan pemaksaan untuk membubarkan dan memusnahkan sesuatu, sedangkan dalam artian luas adalah sesuatu tindak penganiayaan baik fisik maupun psikis terhadap seseorang ataupun kelompok. Menurut Galtung sebagai mana yang dikutip oleh Thomas Santoso kekerasan

adalah suatu tindakan menyakiti dan penekanan. Ia membagi kekerasan itu pada dua bagian, yang pertama kekerasan fisik, dalam kekerasan fisik ini tubuh manusia disakiti secara jasmani dan sampai pada pembunuhan, dan yang kedua adalah kekerasan psikologis, yaitu merupakan suatu tekanan yang mereduksi kemampuan mental atau otak.¹⁸

Peristiwa yang terjadi di Indonesia lebih berlatarbelakang politik dan tidak adanya sebuah ideologi formal dunia yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Kalau pun ada ideologi yang mempengaruhi, maka pengaruh tersebut dibarengi dengan rasa balas dendam, pertualangan, dan lain-lain, sehingga sangat sulit untuk mencari konsep penumpasan yang tepat untuk kasus Indonesia.¹⁹ Colombijn mengatakan bahwa dalam kasus yang terjadi di Indonesia komunis diposisikan sebagai musuh bersama. Konsep ini disebut *the construction of the outsider* yaitu : identifikasi sosial dengan prasangka terhadap orang lain dan identifikasi ekstrim yang mereka lakukan untuk mengevaluasi kelompok mereka dan kelompok lain.²⁰

Kasus penumpasan atau tindak kekerasan yang terjadi pada sebuah negara, akan mengindikasikan bahwa negara tersebut ikut ambil bagian dan melegitimasi proses pembantaian tersebut. Fenomena itu oleh Colombijn disebut dengan *the legitimacy of violence*, yang dimaksud dengan konsep ini adalah : kontrol negara terhadap suatu kekerasan yang bertujuan untuk mengatasi gangguan yang

¹⁸ Thomas Santoso, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (Surabaya : Fisipunair, 2001), hlm. 89-102.

¹⁹ Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, op.chit.*, hlm. 28-30.

²⁰ Freek Colombijn, "Explaining the Violent Solution in Indonesia", *The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1. 2002*, hal. 52, lihat juga Susan T. Fiske, "Stereotyping, prejudice, and discrimination", di Daniel T. Gilbert (eds.) *The Handbook of Social Psychology 2* (Boston : McGraw-hill, 1998), hlm. 357-411.

mengancam posisi mereka.²¹ Dalam hal ini negara berdiri pada satu posisi yang sangat memungkinkan untuk memberikan legitimasi atas pembantaian yang terjadi.

Selain konsep kekerasan, konsep yang tepat digunakan untuk mengkaji kasus yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung adalah konsep yang dipaparkan oleh Colombijn yaitu *the construction of the outsider* dan *the legitimacy of violence*, karena tidak banyaknya terjadi pembunuhan dalam penumpasan yang terjadi di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.²² Kedua konsep ini digunakan untuk melihat siapa dan bagaimana konsep *the construction of the outsider* diarahkan untuk menjadikan PKI sebagai musuh bersama dan *the legitimacy of violence* untuk melihat di mana posisi negara dalam peristiwa tersebut.

Dalam proses penumpasan PKI di Indonesia terjadi beberapa tindak kekerasan, yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik yang menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kekerasan psikologis. Begitupun dengan proses penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung. Terdapat tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis, dan juga terjadi beberapa pembunuhan.

E. Metode Penelitian dan bahan Sumber

Dalam penelitian sejarah ada suatu metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada beberapa langkah yang terdapat dalam metode sejarah.²³ Tahap pertama adalah kegiatan pengumpulan sumber, dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi

²¹ Freek Colombijn *op.cit.*, hlm. 51.

²² Wawancara dengan Tan Malaka tanggal 10 Mei 2010.

²³ Louis Gootschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto) (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 33-35.

kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan literatur tentang permasalahan yang diteliti. Literatur yang merupakan sumber sekunder, yang tertuang dalam buku-buku, karya ilmiah, artikel koran, majalah, skripsi dan *thesis* yang menulis tentang proses pemberantasan PKI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dan informasi tentang situasi Sawahlunto/Sijunjung sebelum PRRI meliputi 1948-1965.

Studi pustaka ini telah dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Budaya Unand, Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Unand, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, dan Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Kabupaten Sijunjung. Selain itu juga dilakukan pencarian arsip pada instansi pemerintah Kabupaten Sijunjung, Kodim (Komando Distrik Militer) Sijunjung, Koramil (Komando Rayon Militer) setiap kecamatan yang ada di Sijunjung, serta arsip-arsip pribadi yang dimiliki oleh anggota PKI atau pihak yang ikut dalam proses pemberantasan PKI. Selain itu studi pustaka telah dilakukan ke pustaka pribadi dosen-dosen ilmu sejarah terkait dengan topik yang dibicarakan.

Di samping data tertulis, juga dilengkapi dengan data lisan yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pelaku sejarah yang memiliki pengalaman terkait dengan permasalahan yang dibicarakan, seperti dengan para pejabat pemerintahan saat itu mulai dari tingkat kabupaten sampai pada pemerintahan nagari. Beberapa anggota PKI yang masih hidup, seperti Johar H. S dan Harun, yang pernah merasakan proses penangkapan dan kemudian dipenjarakan, serta orang-orang yang berkaitan dengan proses pemberantasan PKI

seperti dari kalangan militer dan lapisan masyarakat lain juga diwawancarai. Terkait dengan masalah sumber sejarah, maka sumber yang digunakan sejarah itu ada dua, sumber primer dan sumber sekunder.

Setelah mengumpulkan sumber dan data, dilakukan kritik sumber, kritik ini ada dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah menyangkut kritik yang dilakukan diluar isi sumber, sedangkan kritik intern adalah kritik menyangkut isi sumber. Data yang telah dikritik ini kemudian diinterpretasikan, dan dari hasil interpretasi ini akan muncul fakta. Setelah itu dilakukan langkah terakhir yaitu historiografi atau penulisan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung meliputi pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Sawahlunto/Sijunjung masa reevolusi kemerdekaan dan perkembangan politik Sumatera Barat dan politik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 1950-1960-an.

Bab III membahas tentang pergolakan daerah dan perkembangan PKI. Pembahasan meliputi Sawahlunto/Sijunjung dan pergolakan PRRI, koalisi militer dan PKI di Sawahlunto/Sijunjung, dan perkembangan, gerakan, struktur kepartaian dan organisasi massa PKI di Sawahlunto/Sijunjung.

Bab IV membahas soal penumpasan terhadap PKI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, bentuk tindak kekerasan yang dilakukan, dan juga dibahas tentang pelaku penumpasan. Bab V adalah kesimpulan, dalam bab ini penulis merangkum seluruh pembahasan dalam penulisan ini menjadi satu kesimpulan.